

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN
BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Penelitian
Guna Melanjutkan Tahap Sidang Munaqasah Dalam Ilmu
Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh :

ADITYA PRATAMA

NPM : 1451020002

Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN
BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam



Pembimbing I : Erike Anggraeni, M.E.Sy.

Pembimbing II : Nur Wahyu Ningsih, M.S.Ak., Akt.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440H/2019M

ABSTRAK

Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan standar akuntansi keuangan mengenai laporan keuangan zakat, infaq/sedekah. Standar ini terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 (Revisi 2011) tentang pelaporan keuangan zakat, infaq/sedekah. Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Kota Bandar Lampung yang merupakan salah-satu Badan Amil Zakat Nasional. Peneliti perlu melihat bagaimana pengelolaan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung serta meminta pendapat dari para muzaki mengenai adanya dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana non halal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung serta mengetahui pendapat dari para muzakki tentang adanya penerimaan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisa deskriptif yaitu dengan meneliti dan membahas data yang ada kemudian menganalisis serta membandingkan kenyataan yang terdapat di BAZ dengan teori yang telah dipelajari kemudian dari analisis ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa Laporan Neraca, Laporan Perubahan Dana dan Laporan Aset Kelolaan serta berbagai pendapat dari para muzakki mengenai pro dan kontra adanya penerimaan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung. Sebagian besar dari mereka menganggap bahwa tidak masalah adanya

penerimaan dana non halal selama dana tersebut digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: PSAK No. 109, Laporan keuangan, Dana non halal



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Hendro Suratmin, Sukarame-Bandar Lampung (35131) Tlp. 0721-703260

PERSETUJUAN

**Judul : ANALISIS PENGELOLAAN DANA NON HALAL PADA
LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KOTA BANDAR
LAMPUNG**

**Nama : Aditya Pratama
NPM : 1451020002
Jurusan : Perbankan Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqosyahkan dan di pertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Erike Anggraeni, M.E.Sy.
NIP.198208082011012009**

**Nur Wahyu Ningsih, M.S.Ak., Akt.
NIP. -**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

**Ahmad Habibi, S.E., M.E.
NIP. 197905142003121003**

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Hendro Suratmin, Sukarama-Bandar Lampung (35131) Tlp. 0721-703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“ANALISIS PENGELOLAAN DANA NON HALAL
PADA LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG”**
disusun oleh: **Aditya Pratama**, NPM: **1451020002**, Jurusan: **Perbankan
Syari'ah**. Telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **15 April
2019**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

: **Hanif, S.E., M.M.**

Sekretaris

: **Dinda Fali Rifan, S.E., M.Ak.**

Penguji I

: **H. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.**

Penguji II

: **Erike Anggraini, S.E., M.E.Sy., DBA**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. M. M. Shruddin, M.A.
NPM: **195808241989030003**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Artinya: *“Hai para rasul makanlah dari yang baik-baik (halal) dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa saja yang kamu perbuat”*



PERSEMBAHAN

Teriring untaian salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, ridho serta rahmat-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang insyaallah kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya diakhir zaman. Penulisan skripsi ini dipersembahkan khusus kepada :

1. Motivator terbaik dalam hidupku, dimana do'anya, tangisnya, canda, tawanya, bahagia maupun sedihnya itu membuatku semakin bersemangat untuk terus melangkah maju. Merekalah kedua orang tuaku tercinta, Ayah Abdul Aziz Rais dan Ibu Andriani sulistyawati yang telah memberikan segala hal yang berguna dan bermanfaat demi terwujudnya keberhasilanku. Tiada hal yang dapat membalas semua pengorbanan serta kasih sayang keduanya. Semoga Allah SWT senantiasa selalu memuliakan mereka baik didunia maupun diakhirat.
2. Adik-adikku tercinta, Adriansyah Dwi Syaputra dan Asyifa Kalisa Putri beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan moral maupun materil serta segala perhatian kalian selama ini yang telah membuatku terus terpacu untuk segera menyelesaikan pendidikan ini.
3. Rekan-rekanku mahasiswa program studi Perbankan syariah angkatan 2014, serta keluarga baruku dikelas Perbankan Syariah kelas B yang telah berjuang dan belajar bersama-sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

4. Sahabat-sahabatku Gagas Prabowo, Muhammad Husen, Amalia Nuraini, Syahrudin, Uswatun Nur Hasanah, Nita Anggraini, Ani yuliawati, Dini Apriantin, Siti Istiqomah, Milkia Ulfa, Ermawati, S.E, Rizki Ramadani, S.E, Mardiah, S.E, Narul Ita Sari, S.H, Dani Saifuddin, S.E, Alif Rahmady, S.Sos, Rio Langgeng Martopo, S.Sos, Jovie Wijaya, S.E, Risky Anggraini, S.E, Nurul Hidayat, Ayunda Asoka Putri, Lisna Juwita. Terimakasih untuk semua kebersamaan, kebahagiaan, perdebatan dan pendewasaan yang telah kalian berikan.
5. Almamater Uin Raden Intan Lampung yang tercinta dan yang aku banggakan.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Aditya Pratama, dilahirkan pada tanggal 21 Juli 1997 di Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, sebagai anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara, dari pasangan Ayah Abdul Aziz Rais dan Ibu Andriani Sulistyawati.

Penulis menempuh pendidikan pada :

1. Sekolah Dasar SDN 02 Madukoro baru, Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
2. Sekolah Menengah Pertama SMPN 06 Kotabumi, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.
3. Sekolah Menengah Atas SMAN 02 Kotabumi, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.
4. Penulis melanjutkan studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2014.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan kasih dan sayang-Nya kepada penulis berupa kesehatan, kesabaran, serta ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung”**.

Kepada junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad SAW sebagai revolusioner Islam, penyebar risalah-risalah Allah SWT dan sebagai pilar penegak panji-panji Islam dipermukaan bumi ini, rasanya lazim kita sebagai umatnya bersholawat atas beliau SAW. Mudah-mudahan kelak akan memperoleh syafaatnya.

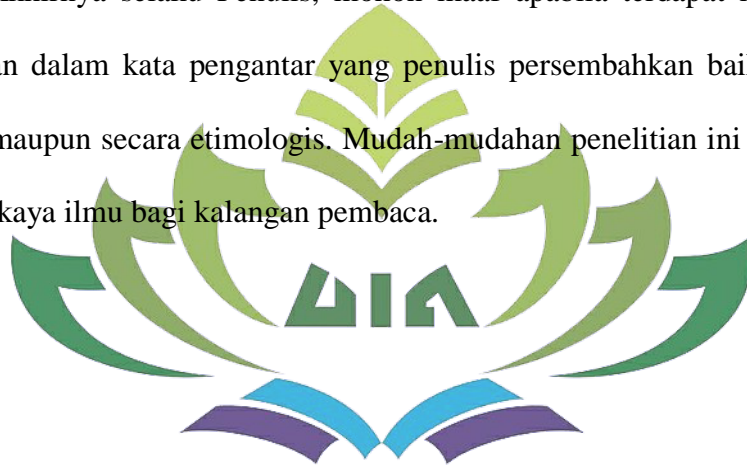
Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang andil dan berkontribusi dalam bentuk tenaga, pikiran serta materil demi terciptanya tugas penulisan dan penelitian skripsi ini sesuai dengan apa yang Penulis harapkan. Kemudian dari pada itu Penulis tidak lupa pula menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Ayah Abdul Aziz Rais dan Ibu Andriani Sulistyawati, adik-adikku, serta seluruh keluarga besar tercinta atas rasa cinta dan sayang yang senantiasa mendo'akan dan mendukungku hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag., selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi para mahasiswa/i untuk menjadi pribadi berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai islami.
3. Bapak Dr. Moh Baharuddin, M.A., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan para mahasiswa/i.
4. Bapak Ahmad Habibi, S.E., M.E., selaku ketua jurusan Perbankan Syariah yang menjadi panutan dan selalu memberikan dukungan terhadap para mahasiswa/i.
5. Ibu Erike Anggraeni, M.E.Sy., selaku pembimbing 1 (satu) yang banyak memberikan masukan dan motivasi didalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nur Wahyu Ningsih, M.S.Ak., Akt., selaku pembimbing 2 (dua) yang tidak hanya memberikan motivasi juga merupakan motivator terbaik bagi penulis agar dapat seperti beliau.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah ikhlas memberikan ilmu, pengalaman, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung ini.
8. Pimpinan dan Karyawan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi data referensi yang dibutuhkan oleh penulis.
9. Sahabat-sahabatku tercinta yang telah membantu, mendampingi dan memberi motivasi serta dukungan yang penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Walau secara eksplisit penelitian skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa dan tampak sempurna, namun penulis menyadari bahwa mungkin di dalamnya banyak menyimpliskan berbagai kesalahan, kekurangan serta jauh dari kesempurnaan hakiki yang tak luput dari kekurangan dan kelalaian penulis sebagai makhluk yang *dha'if*. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik serta saran bersifat konstruktif yang menjadi pelajaran dan pembenahan bagi penulis sebagai modal untuk penulisan berikutnya.

Akhirnya selaku Penulis, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kata pengantar yang penulis persembahkan baik dari segi tata bahasa maupun secara etimologis. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat dan memperkaya ilmu bagi kalangan pembaca.



Bandar Lampung, 15 April 2019

Penulis

ADITYA PRATAMA
NPM. 1451020002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
G. Tinjauan Pustaka	14
H. Metode Penelitian.....	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Dana Non Halal.....	25
-------------------------------	----

1. Pengertian Dana Non Halal.....	25
2. Sumber Dana Non Halal	26
3. Distribusi Penerimaan Dana Non Halal	26
4. Pandangan Islam Terhadap Dana Non Halal	27
5. Akuntansi Dana Non Halal	28
 B. Konsep Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Berdasarkan Exposure Draft (ED) PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat	 29
1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat	32
2. Pengakuan dan Pengukuran Infak/Sedekah	33
3. Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal	35
4. Penyajian dan Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah, Dana Amil dan Dana Non Halal.....	 36

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
1. Sejarah Singkat Berdirinya BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	48
2. Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	49
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	51
4. Tempat dan Kedudukan BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	51
B. Program Kerja BAZNAS Kota Bandar Lampung	52
1. Bandar Lampung Peduli.....	52
2. Bandar Lampung Taqwa	52
3. Bandar Lampung Cerdas.....	53
4. Bandar Lampung Sehat.....	53
5. Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan	53
C. Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Kota Bandar Lampung	54

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung	55
1. Pertumbuhan Serta Kebijakan Adanya Penerimaan Dana Non Halal BAZNAS Kota Bandar Lampung	55
2. Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	62
3. Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	65
B. Pendapat Muzakki Mengenai Adanya Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Bandar Lampung	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Lap. Posisi Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung	9
1.2 Lap. Posisi Keuangan ED PSAK No. 109	11
2.2 Laporan Sumber Perubahan Dana ED PSAK No. 109	43
2.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan ED PSAK No. 109	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Pra Riset

Lampiran 2 Surat Persetujuan Seminar Proposal

Lampiran 3 Surat Izin Riset

Lampiran 4 Surat Balasan Permohonan Izin Riset

Lampiran 5 Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Baznas Kota Bandar Lampung
Th. 2017

Lampiran 6 Laporan Perubahan Dana Baznas Kota Bandar Lampung Th. 2017

Lampiran 7 Laporan Perubahan Atas Aset Kelolaan Baznas Kota Bandar
Lampung Th. 2017

Lampiran 8 Daftar Para Muzaki Baznas Kota Bandar Lampung

Lampiran 9 Panduan Wawancara

Lampiran 10 Gambar-Gambar



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam upaya memperjelas arah dan batas penelitian serta menghindari terjadinya kesalahan interpretasi terhadap skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGELOLAAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN BAZNAZ KOTA BANDAR LAMPUNG”**, maka terlebih dahulu perlu ditegaskan pengertian dan maksud istilah-istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis secara bahasa adalah penyidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya sebab dan akibat perkaranya.¹

2. Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.²

¹Sri Sukesri Adi Wimarta, Adi Sunaryo, dkk, *“kamus besar bahasa indonesia edisi ketiga”*, (jakarta: Balai pustaka, 2005), h. 43

² Suharsimi Arikunto, *“Pengelolaan”*, (1993: 31), h. 14

3. Dana Non Halal

Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.³

4. Laporan Keuangan

Akuntansi keuangan sangat erat kaitannya dengan laporan keuangan (*financial statement*). Sadeli dalam bukunya menjelaskan laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Menurut Kieso, dalam bukunya yang berjudul *Intermediate Accounting Volume 1 IFRS Edition* mengungkapkan bahwa, laporan keuangan merupakan sarana utama bagi suatu perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak luar.⁴

5. BAZNAS

Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan

³M Jusuf Wibisana-dkk, “*Exposure Draft PSAK 109*”, (Jakarta 26 februari 2008), h. 32-33

⁴Sabrina Shahnas, “*Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara*”, (SULUT; 2014), h. 317

Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh masyarakat.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka judul skripsi ini dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapannya harus dilakukan secara benar sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai lembaga pengelolaan zakat sehingga didalam pendistribusian dananya nanti jadi lebih jelas dan tidak disalahgunakan sekaligus menjadikan lembaga BAZNAS Kota Bandar Lampung menjadi lembaga yang transparan dan amanah bagi para muzakki.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Masalah ini merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti, mengingat bahwasanya membayar zakat untuk umat muslim itu wajib hukumnya, apalagi pemerintah telah membentuk suatu badan zakat nasional yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar zakat. Akan tetapi disini perlu dijelaskan lebih lanjut tentang pengelolaan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung karena seperti yang telah kita ketahui bahwa laporan keuangan untuk dana non halal sendiri masuk kedalam laporan laba-rugi dan

⁵Didin Hafhiduddin, "*Zakat Dalam Perekonomian Modern*", (Jakarta; Gemma Insani, 2002), h.130

biasanya pada lembaga-lembaga tertentu laporan untuk dana non halal ini jarang diungkapkan secara jelas.

2. Alasan subyektif

- a. Penelitian ini belum pernah dilakukan, diteliti, dan dibahas sebelumnya oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung khususnya angkatan 2014.
- b. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang saat ini sedang ditempuh peneliti, yaitu berkaitan dengan keuangan dimana seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan non halal untuk lembaga keuangan syariah itu pasti ada untuk disetiap kegiatan yang berhubungan dengan bank non syariah. Biasanya dana non halal tersebut disediakan tersendiri dalam laporan keuangan bank syariah yang nantinya digunakan untuk keperluan dana kebajikan umat. Namun untuk masalah disini nantinya peneliti akan menjelaskan lebih lanjut tentang pengelolaan dana non halal yang diterima oleh badan amil zakat yang dapat dilihat dari hasil laporan keuangan kususnya pada laporan laba-ruginya.
- c. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh peneliti dengan pertimbangan data yang digunakan melalui riset yang akan dilakukan secara langsung dengan BAZNAS Kota Bandar Lampung.

C. Latar Belakang

Saat ini perkembangan kesadaran masyarakat muslim tentang pembayaran zakat semakin tinggi, hal ini wajar dikatakan mengingat negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat muslim terbanyak didunia. Pemerintah juga memberikan kepedulian mengenai pengelolaan dana zakat yang dibuktikan dengan adanya Undang-Undang No.23 tahun 2011. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai salah satu institusi yang dihadapkan dengan peningkatan kesadaran dan pengawasan masyarakat tentang pengumpulan zakat dan penyaluran zakat harus mengacu pada UU No.23 tahun 2011 dan penyusunan laporan keuangan wajib berdasarkan PSAK No.109.⁶

Pada tahun 2005, Forum Organisasi Zakat (FOZ) berupaya untuk menyusun Pedoman Akuntansi bagi Organisasi Pengelola Zakat (PA-OPZ).Belum sempat disosialisasikan dan diterapkan secara luas, FOZ telah mengadakan kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyusun PSAK Zakat pada tahun 2007.Dan pada tahun 2008, IAI telah menyelesaikan Exposure Draft (ED) PSAK No.109 tentang akuntansi zakat yang resmi diberlakukan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pengelola zakat per 1 januari 2009.Akhirnya pada bulan Oktober 2011, ED PSAK No.109 telah disahkan oleh IAI

⁶Nur Hisamuddin - Iva Hardianti Sholikha, *“Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang”*, (Lumajang, 2012), h. 3

sebagai standarisasi pelaporan akuntansi zakat bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).⁷

Salah satu pembahasan dalam PSAK No.109 tentang akuntansi zakat adalah mengatur sumber penerimaan dan penyaluran dana non halal. Adanya dana non halal dalam ED PSAK No.109 ini menimbulkan perdebatan yang signifikan antara beberapa ulama dan praktisi ekonomi syariah sehingga terjadi perubahan dalam PSAK No.109 yakni hanya memberikan kebijakan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mengungkapkan sumber, alasan, jumlah, dan penyaluran dana non halal.⁸

Dana non halal berarti dana yang berasal dari sesuatu yang tidak halal yakni dana yang berasal dari sesuatu yang jelas haram hukumnya, baik itu haram karena dzatnya (*haram li-zatihi*) dan haram bukan karena dzatnya (*haram li-gayrihi*), sebagaimana dalam hadits :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ
النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ
وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ « إِنَّ الْحَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا
مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ
وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا
وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ
صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

⁷Ahmad Roziq – Widya Yanti, “Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat”, (Surabaya; 2011), h. 21

⁸*Ibid.*,

Artinya: Diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani dari Ayahku dari Zakaria dan Sya'yi dari Nu'man bin Basyir berkata sara mendengar Rasulullah SAW bersabda dengan membisikkan kepada telinga Nu'man "Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram jelas, dan diantara keduanya ada perkara-perkara syubhat, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat tersebut, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya, dan barangsiapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka dia jatuh pada hal yang haram. Seperti seorang penggembala yang mengembala di sekitar daerah larangan, lambat laun akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah setiap raja memiliki daerah larangan, sedangkan daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkanNYA. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, apabila dia baik maka baiklah seluruh jasad, dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruh jasad. Ketahuilah dia adalah hati". (H.R Muslim)

Berikut ketentuan ED PSAK No.109 tentang pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dana non halal:

1. Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang,

2. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan amil zakat. Aset non halal disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal (jika ada), diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.⁹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung sebagai lembaga legal yang dibentuk pemerintah untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat yang ada di lingkungan Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor 451.13/712.A/L08/2017 tanggal 17 Juli 2017 Tentang Gerakan Sadar Zakat serta Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 106/L.06/Hk/2017 tentang Penetapan Pengurus BAZNAS Kota Bandar Lampung.¹⁰

Sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional, BAZNAS kota Bandar Lampung diharapkan dapat memaksimalkan peranan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada didalam peraturan PSAK No.109, bukan hanya sekedar menghimpun dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan hukum syar'i saja, akan tetapi semua harus teroganisir secara professional dan transparan sesuai dengan visi dari BAZNAS kota Bandar Lampung itu

⁹*Ibid.*,

¹⁰Dokumen resmi milik BAZNAS kota Bandar Lampung, dikutip pada tanggal 2 Oktober 2018

sendiri yaitu “MENJADIKAN BAZNAS YANG AMANAH, TRANSPARAN DAN PROFESIONAL” terutama didalam mengungkapkan dana non halal nya.

Berikut bentuk laporan keuangan (Neraca) BAZNAS kota Bandar Lampung terbaru untuk akhir tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.1
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
(Dengan Angka Pembandingan Untuk Tahun Yang Berakhir 2016)
(Dinyatakan dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2017 (Audited)	2018 (Un.Audited)
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2b,3	1,282,564,093,00	701,427,608,00
Piutang Qardul Hasan-Amil	2c,4	20,000,000,00	5,000,000,00
Jumlah Aset Lancar		1,302,584,093,00	706,427,608,00
Aset Tetap Kelolaan	2d,5	61,060,000,00	50,710,000,00
Jumlah Aset Tetap dan Aset Kelolaan			
Jumlah Aset		1,363,624,093,00	757,137,608,00
Liabilitas dan Saldo Dana			
Liabilitas Jangka Pendek			
Biaya yang Masih Dibayar			
Utang Kepada Pihak Ketiga	2e,6	8,000,000,00	-
Jumlah Kewajiban Lancar	7	8,000,000,00	-
Saldo Dana		16,000,000,00	-
Dana Zakat	2f,15	413,840,00	2,298,861,00
Dana Infaq/Sedekah	2f,15	1,316,057,108,00	748,838,747,00
Dana Amil	2f,15	31,153,145,00	6,000,000,00
Jumlah Saldo Dana		1,347,624,093,00	757,137,608,00
Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana		1,363,624,093,00	757,137,608,00

Sumber: Dokumen pribadi BAZNAS Kota Bandar Lampung tahun 2017

Tabel 1 menjelaskan laporan posisi keuangan (neraca) yang terdapat pada BAZNAS kota Bandar Lampung dimana dapat dilihat bahwa pada jurnal tersebut belum adanya akun yang mengungkapkan keberadaan dana non halal yang seharusnya diungkapkan dalam neraca tersebut. Akan tetapi masalah tersebut belum bisa untuk disimpulkan sekarang, karena untuk penyusunan laporan keuangan zakat yang tidak menggunakan prinsip PSAK No.109 (atau masih menggunakan peraturan yang lama), akun dana non halal biasanya masuk kedalam akun lain di jurnal yang berbeda. Akan tetapi dari neraca tersebut juga dapat dilihat bahwasannya lembaga BAZNAS kota Bandar Lampung cukup baik dalam mengaudit laporan keuangannya, dengan begitu maka dana yang akan masuk dan dana yang akan keluar bisa dilihat jelas dari mana dan untuk apa nantinya.

Dapat dilihat sebelumnya bentuk dari laporan keuangan BAZNAS kota Bandar Lampung yang belum mengungkapkan keberadaan dana non halalnya, dan berikut adalah table ilustrasi dari laporan keuangan BAZNAS berdasarkan peraturan PSAK No.109 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Laporan Posisi Keuangan Baz “xxx”
Per 31 desember 2xx2

Keterangan	RP	Keterangan	RP
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang Masih Harus Dibayar	xxx
Instrumen Keuangan	xxx		
Piutang	xxx	Kewajiban Jangka Panjang	
		Imbalan Kerja Jangka Panjang	xxx
Aset Tidak Lancar		Jumlah Kewajiban	xxx
Aset Tetap	xxx	Saldo Dana	
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	Dana Zakat	xxx
		Dana Infak/Sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		Dana Non Halal	xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

Sumber: ED PSAK No. 109 Ikatan Akuntansi Indonesia

Tabel 2 menjelaskan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) berdasarkan peraturan PSAK No. 109 dimana amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dan infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Dana zakat

- a. Penerimaan dana zakat
- b. Penyaluran dana zakat
- c. Saldo awal dana zakat
- d. Saldo akhir dana zakat

Dana infak/sedekah

- a. Penerimaan dana infak/sedekah
- b. Penyaluran dana infak/sedekah
- c. Saldo awal dana infak/sedekah
- d. Saldo akhir dana infak/sedekah

Dana amil

- a. Penerimaan dana amil
- b. Penggunaan dana amil
- c. Saldo awal dana amil
- d. Saldo akhir dana amil



Dana nonhalal

- a. Penerimaan dana nonhalal
- b. Penyaluran dana nonhalal
- c. Saldo awal dana nonhalal
- d. Saldo akhir dana nonhalal

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti terdorong untuk memilih judul penelitian yaitu **“ANALISIS PENGELOLAAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG”**.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanapengelolaan dana non halalpada laporan keuangan BAZNAS kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana pendapat adanya dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung menurut para muzakki ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaandana non halal terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pendapat para muzaki mengenai adanya dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yangbermanfaat bagi semua pihak, yaitu antara lain:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan dalam pengungkapan dana non halal pada lembaga

zakat nasional khususnya pada laporan keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung.

2. Bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan literatur serta referensi yang dapat dijadikan informasi dan Rujukan bagi mahasiswa yang akan meneliti pada permasalahan hampir serupa.

3. Bagi lembaga

Memberikan informasi kepada manajemen lembaga Badan Amil Zakat Nasional dengan harapan dapat digunakan sebagai referensi kebijakan lebih lanjut dalam mengungkapkan dana non halal sesuai dengan PSAK No. 109 khususnya untuk BAZNAS Kota Bandar Lampung.

4. Manfaat bagi Masyarakat

Memberi informasi kepada masyarakat tentang pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung.

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan dana non halal terhadap BAZNAS adalah sebagai berikut:

1. Marliyati (2015) melakukan penelitian untuk mengevaluasi sistem pengelolaan zakat dan akuntabilitas laporan keuangan Lembaga Amil Zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan model *multiple case study* LAZ yang memiliki distribusi zakat terluas di Kota Semarang. Studi Kasusnya meliputi: BAZNAS Kota Semarang, LAZIS Baiturrahman, PKPU, DPU Darut Tauhid, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa laporan keuangan yang tersedia seluruhnya di LAZ, kecuali laporan perubahan aset kelolaan. Sistem akuntansi seluruhnya 100% tersedia, kecuali flowchart dan jurnal. Pengendalian intern belum sepenuhnya dipatuhi dan sebagian besar LAZ belum menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK No. 109. Akuntabilitas laporan keuangannya merupakan perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat, negara, dan Tuhan (Allah Swt).

Persamaan : penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan mengenai metode penelitian yang digunakan yakni model penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Perbedaan : penelitian terdahulu difokuskan kepada sistem pengelolaan zakat baik penghimpunan maupun pendayagunaan zakat, dengan sampel 8 lembaga amil zakat di kota Semarang. Penelitian sekarang lebih

difokuskan mengenai kinerja amil zakat dalam pengelolaan dana non halal yang diungkapkan dalam laporan keuangan pada lembaga BAZNAS.¹¹

2. Rika dkk (2014) melakukan penelitian untuk mengetahui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi zakat dana infak/sedekah, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan akuntansi zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) kota Bandung, menganalisis implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber penelitian adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data sekunder berasal dari laporan keuangan lima Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah memuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, (2) Persamaan akuntansi zakat pada LAZ kota Bandung yaitu dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, sedangkan perbedaannya dalam hal kelengkapan komponen laporan keuangan, (3) Implementasi akuntansi zakat pada LAZ di kota Bandung sudah baik mengacu kepada PSAK No. 109, meskipun belum semuanya optimal.

¹¹ Marliyati, "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung", (Bandung; 2015)

Persamaan: penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan yakni menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta teknik pengumpulan data yang sama yakni dengan cara studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan: penelitian terdahulu lebih mengutamakan penerapan PSAK No. 109 dalam laporan keuangan lembaga amil zakat dan menggunakan 5 sampel lembaga amil zakat sebagai perbandingan lembaga manakah yang lebih lengkap dalam melakukan implementasi PSAK No. 109 terhadap laporan keuangannya masing-masing. Penelitian sekarang hanya memfokuskan terkait pengelolaan dana non halal pada laporan keuangan lembaga BAZNAS.¹²

3. Ahmad dan Widya (2013) melakukan penelitian dengan dasar ingin mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi Amil Zakat Lembaga dana non halal dan membandingkannya dengan PSAK No. 109. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data studi kasus dengan mengambil LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya sebagai obyek penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa ke tiga lembaga telah menerapkan PSAK No. 109 dalam hal penyusunan laporan keuangan, namun dalam perlakuan akuntansi dana non halal belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109. Perlakuan akuntansi dana

¹² Rika dkk, “*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Terhadap Lembaga Amil Zakat Kota Bandung*”, (Bandung; 2014)

non halal ini meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Persamaan: penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terkait topik manajemen zakat yang sama-sama ingin mengungkap dana non halal yang ada pada lembaga BAZNAS.

Perbedaan: pada penelitian terdahulu lebih difokuskan kepada penggunaan PSAK No. 109 dalam mengungkap dana non halal yang ada pada lembaga BAZNAS, yang kaitannya lebih mengarah kepada hukum ekonomi islam sedangkan pada penelitian sekarang sama-sama menggunakan PSAK No. 109 tetapi lebih difokuskan dalam pengelolaan dana non halal pada laporan keuangannya.¹³

4. Siti Wasila (2013) melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat Yayasan dana sosial Al-Falah Surabaya. Teknik penelitian yakni dengan melakukan analisis deskripsi dengan sumber data wawancara dan data sekunder. Atas penelitian ini ditemukan bahwa akuntansi ZIS mampu menstimulasi perilaku individu-individu yang selalu bertransformasi.

Persamaan: penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan pada mekanisme pengelolaan zakat dan Sumber data yang akan digunakan diperoleh dengan cara yang sama yakni observasi langsung, wawancara dan dokumentasi.

¹³ Ahmad dan Widya, “*Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat*”, (Surabaya; 2013)

Perbedaan: penelitian terdahulu lebih difokuskan kepada masalah tentang akuntansi yang diterapkan oleh lembaga BAZNAS, sedangkan pada penelitian sekarang lebih membahas masalah tentang pengelolaan dana non halal pada laporan keuangan lembaga BAZNAS.¹⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁵

Dalam bukunya Lexy J. Moleong dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara

¹⁴ Siti Wasila, “Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al – Falah Surabaya”, (Surabaya; 2010)

¹⁵ Sugiyono, “metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D”, (Bandung: alfabeta, cet ke-4, 2008), h. 41.

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁶

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat dekriptif. penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam penelitiannya tidak perlu memasukan hipotesis. Penelitian ini bermksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, seberapa banyak, sejauh mana dan bagaimana menjelaskan atau menerangkan peristiwa.¹⁷

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁸

- a. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data tentang Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung.
- b. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder

¹⁶ Lexy J. Moloeng, "*Metode penelitian kualitatif*", (Bandung:PT remaja rosdakarya,2009), h. 6

¹⁷Moh. Papundu tika, "*metode riset bisnis*", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), cet-1, h. 226

¹⁸Sugiono ,*op.cit*, h.225

¹⁹*Ibid.*, h.225

adalah dokumen-dokumen resmi, brosur, website, profil dan struktur organisasi pada BAZNAS Kota Bandar Lampung.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini terdiri atas:

- a. Metode observasi, observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data suatu penelitian merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan dan studi yang disengaja dan sistematis tentang sesuatu keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.²⁰
- b. Metode wawancara yaitu proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²¹ Teknik ini digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data secara langsung dengan narasumber agar lebih jelas permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini yang diwawancarai penulis adalah staf BAZNAS Kota Bandar Lampung terkait tentang pengelolaan dana non halal pada laporan keuangannya dan pendapat dari para muzaki mengenai adanya dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung.

²⁰ Mardalis, "*metode penelitian suatu pendekatan proposal*", (Jakarta:bumi aksara, 2008). h. 63

²¹Cholid narbuko, dkk, "*metodologi penelitian*", (Jakarta: bumi aksara,2010), h.

- c. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²² Yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil wawancara. Dalam metode ini penulis menggunakan data-data dari BAZNAS Kota Bandar Lampung yang berupa dokumen resmi guna mendapatkan data yang relevan dengan penelitian ini. Seperti profil, gambaran umum tentang BAZNAS Kota Bandar Lampung, brosur serta website.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengelolaan data dapat dilakukan dengan cara:²³

a. Editing (Pemeriksaan Data)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul telah sesuai, sudah cukup lengkap, benar, dan relevan sesuai dengan Masalah.

b. Klasifikasi (pengelompokan data)

Yaitu proses pengelompokan data apakah data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan.

c. Interpretasi (Penafsiran)

Penafsiran terhadap hasil yang diperoleh melalui observasi sehingga memudahkan untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.

²²M. iqbal Hasan, “*pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h.159.

²³Sutrisno Hadi, “*Metode Research jilid 1*”, (Yogyakarta: Andi, 2002), h.42

5. Populasi

Populasi adalah terdiri dari objek atau suatu subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian disimpulkan populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek itu.²⁴

Populasi penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari pimpinan BAZNAS Kota Bandar Lampung, manager, marketing dan seluruh karyawan BAZNAS Kota Bandar Lampung serta 30 orang muzakki dari BAZNAS Kota Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian populasi atau total sampling hasil penelitian terhadap sampel diharapkan dapat digeneralisasikan kepada seluruh populasi,²⁵ karena jumlah populasinya kecil maka sebagai sampelnya adalah seluruh populasi yaitu pimpinan, manager, marketing, dan seluruh karyawan serta 5 orang muzakki BAZNAS Kota Bandar Lampung.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

²⁴Sugiono, *loc. Cit.*, h.117.

²⁵Arikunto-Suharsini, "*Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*", (Jakarta: PT. Rineks Cipta, 2010), h.130.

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain²⁶.

Menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menjelaskan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk data lapangan dan uraian deskriptif.



²⁶Sugiyono, *loc. Cit.*, h.35

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dana Non Halal

1. Pengertian Dana Non Halal

Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Dalam PSAK No. 109 penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Darurat adalah suatu keadaan emergency dimana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat, akan membawanya kejurang kehancuran atau kematian.

Dalam diskusi intensif Ikatan Akuntansi Indonesia dan MUI pada 10 September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk merubah istilah dana non halal. Istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum. Alasan dirubahnya istilah dana non halal menjadi dana untuk kepentingan umum yaitu istilah dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, infak dan shodaqoh, serta pada prinsipnya dana tersebut

dapat digunakan (bukan dananon halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan).²⁷

2. Sumber Dana Non Halal

Sumber dana non halal merupakan sumber dana yang berasal dari internal dan eksternal bank. Sumber dana internal meliputi infak, shodaqoh, dan hibah. Sedangkan sumber dana eksternal meliputi denda, bunga bank, dan lain sebagainya. Banyak pendapat dan tanggapan dari para ulamadan ahli fiqih baik klasik maupun kontemporer tentang bunga bank dan riba. Pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syekh Mahmud Syaltut adalah “pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan”.²⁸

3. Distribusi Penerimaan Dana Non Halal

Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam salah satu hal yang bermanfaat bagi kaum Muslimin dari pada membiarkannya berpindah ketangan kaum kafir yang akhirnya akan mereka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan Allah. Aset non halal bisa disalurkan asal sesuai dengan syariah. Dana non halal biasanya dapat dialokasikan pada masalah-masalah sosial misalnya pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, pembangunan penyaluran air, dan yang lainnya untuk kepentingan sosial. Dana non halal tidak diper kenankan

²⁷Nur Hisamuddin - Iva Hardianti Sholikha, *Ibid.*, h. 15

²⁸*Ibid.*,

untuk pembuatan fasilitas atau tempat ibadah seperti musholah dan masjid.²⁹

4. Pandangan Islam Terhadap Dana Non Halal

a. Menurut Yusuf Qardhawi

Masalah haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Islam menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga. Oleh karenaitu siapa yang mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencana-rencana yang lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafaat baginya sehingga dengan demikian dosa haramnya itu harus dihapus.

b. Menurut Syafi'i Antonio

Sifat qard tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qard dapat diambil dari:

- 1) Qard yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana dapat diambilkan dari modal bank;
- 2) Qard yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan

²⁹*Ibid.*,

shodaqoh. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk qard, yaitu pendapatan yang diragukan, seperti bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

c. Menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa segala syarat yang tidak menyelisihi syariat adalah sah, dalam semua bentuk transaksi.³⁰

5. Akuntansi Dana Non Halal

Penerimaan dana non halal oleh amil dipisahkan dari dana zakat, dana infak, dan shodaqoh. Penerimaan bunga bank, jasa giro dan sebagainya diakui sebagai dana non halal menurut PSAK nomor 109. Dana non halal ini dipisahkan dari aset pada laporan keuangan amil karena aset dana non halal harus dikeluarkan/disalurkan sesuai dengan syariah. Dana non halal yang diterima oleh amil pada umumnya merupakan penerimaan dalam keadaan darurat yang tidak sesuai dengan syariat biasanya merupakan penerimaan yang bersumber dari pendapatan jasa giro bank dan bunga.

Penerimaan zakat, infak, shodaqoh dari muzakki melalui transfer bank konvensional itu pada saat tertentu bisa jadi terdapat unsur dana non halal yaitu berupa bunga bank. Sedangkan bunga dari bank konvensional merupakan bagian dari riba dan riba adalah tidak sesuai dengan syariat.

³⁰*Ibid.*, h. 16

Oleh karena itu amil memisahkan dana yang sifatnya darurat tersebut dari dana zakat, infak, dan shodaqoh. Dana non halal memang tidak dapat dihindari oleh amil dan dana tersebut yang diterima oleh amil tersebut harus segera dikeluarkan atau disalurkan dalam bentuk bantuan umum untuk masyarakat seperti pembangunan jalan, renovasi toilet umum dan sebagainya. Amil mengungkapkan dana non halal tersebut dan mengklasifikasikan sesuai dengan sumber penerimaannya. Keberadaan dana non halal juga tidak boleh terlalu lama berada di amil dan secepat mungkin untuk dikeluarkan.³¹

B. Konsep Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Berdasarkan Exposure Draft(ED) PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat

Standar akuntansi ini merupakan masalah penting dalam profesi dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar keuangan saat ini umumnya disusun oleh lembaga resmi yang diakui pemerintah, profesi dan umum. Kalau di Indonesia yang berwenang menyusun adalah Komite Standar Akuntansi Keuangan yang berada dibawah naungan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Komite Standar akuntansi menyerahkan hasil kerjanya kepada

³¹*Ibid.*,

komite pengesahan standar akuntansi keuangan Indonesia dan akhirnya akan ditetapkan dan disahkan dalam kongres IAI.³²

Penyusunan standar akuntansi di Indonesia, perkembangan standara kuntansi keuangan sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini pengembangan standar akuntansi ini dilakukan secara terus menerus, pada tahun 1973 terbentuk panitia perhimpunan bahan-bahan dan struktur Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) dan Generally Accepted Auditing Standards (GAAS), kemudian pada tahun 1974 terbentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI) yang bertugas menyusun standar keuangan. Komite PAI telah bertugas selama 4 periode kepengurusan IAI selama tahun 1974 sampai 1994 dengan susunan personel yang telah diperbaharui. Selanjutnya periode kepengurusan PAI, nama PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK), kemudian Komite SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Dewan SAK) untuk masa bakti 1994 sampai 2000 dan diberikan otonomi untuk penyusunan dan mengesahkan SAK.³³

IAI telah menyusun *Exposure Draft* (ED)PSAK No. 109, tentang akuntansi zakat dan infaq/sedakah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infaq/sedekah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Secara umum semua LKS baik komersial maupun nirlaba memiliki transaksi pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah baik dari

³²Indah Sicilia, “*Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) kota Pekanbaru*”, (Pekanbaru; 2012), h. 13

³³*Ibid.*,h. 14

individu di dalam entitas maupun dari luar entitas yang diamanahkan kepada LKS. Secara khusus, LKS yang memiliki kompetensi untuk mengelola ZIS adalah Organisasi Pengelola Zakat yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ).³⁴

ED PSAK dikeluarkan oleh IAI pada tanggal 26 Februari 2008. ED PSAK No.109 tentang Akuntansi ZIS diusulkan hanya diberlakukan untuk entitas pengelola zakat dan infaq/sedekah saja atau dengan kata lain hanya untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) saja, sedangkan entitas pembayar atau entitas penerima diharapkan mengacu pada PSAK No. 101 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah.³⁵

Bagan Pembahasan Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi “Amil” sebagai Organisasi Pengelola ZIS



Sumber: Skripsi Indah Sicilia tahun 2012.³⁶

³⁴*Ibid.*,

³⁵*Ibid.*,

³⁶ Indah Sicilia, “*Bagan Pembahasan Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Amil Sebagai Organisasi pengelola ZIS*”, (Pekanbaru; 2012)

Bagan tersebut menjelaskan tentang alur pembahasan akuntansi bagi amil yang diterapkan sesuai dengan ED PSAK No. 109 tentang akuntansi Zakat, Infaq/sedekah, serta dana non halal ZIS yang diterima oleh amil harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat

a. Pengakuan Awal

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Sedangkan zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- 1) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
- 2) jika dalam bentuk nonkas, maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut.³⁷

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat bagian non amil.³⁸

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

³⁷*Ibid.*, h. 15

³⁸*Ibid.*,

- 1) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- 2) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan kelalaian amil.³⁹

c. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :

- 1) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- 2) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.⁴⁰

2. Pengakuan dan Pengukuran Infaq/Sedekah

a. Pengakuan Awal

Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar :

- 1) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- 2) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.⁴¹

penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset non kas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dalam PSAK relevan. Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/sedekah

³⁹*Ibid.*, h. 16

⁴⁰*Ibid.*,

⁴¹*Ibid.*, h. 17

untuk bagian penerima infaq/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infaq/sedekah ditentukan amal sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amal.⁴²

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas. Aset non kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amal dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar Infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana Infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amal dapat pula menerima aset non kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomis panjang, seperti mobil ambulan.⁴³

Aset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

⁴²*Ibid.*,

⁴³*Ibid.*,

- 1) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;
- 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.⁴⁴

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelola diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.⁴⁵

c. Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.⁴⁶

3. Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal

Penerimaan dana non halal adalah penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah

⁴⁴*Ibid.*, h. 18

⁴⁵*Ibid.*,

⁴⁶*Ibid.*,

dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.⁴⁷

4. Penyajian dan Pengungkapan Zakat, Infaq/Sedekah, Dana Amil dan Dana Non Halal.

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

a. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

- 1) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan;
- 2) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- 3) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- 4) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
- 5) hubungan yang istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi :

⁴⁷*Ibid.*,

- a) sifat hubungan istimewa;
- b) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
- c) persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.⁴⁸

b. Infaq/Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas;
- 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- 3) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan;
- 4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah.

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan kepada pembacanya dengan harapan bahwa setelah disajikan informasi tadi dianggap berguna oleh pembaca. Adapun komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari Neraca (laporan posisi keuangan), laporan sumber dan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan,

⁴⁸*Ibid.*, h. 19

laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.⁴⁹ Dalam hal ini akan dijelaskan komponen laporan keuangan yang terdapat didalam suatu lembaga BAZ sesuai dengan peraturan PSAK 109 yaitu:

a. Laporan Posisi Keuangan

Definisi neraca dapat diartikan suatu aktiva, kewajiban dan modal pemilik perusahaan pada tanggal tertentu, yang biasanya pada tanggal terakhir satu bulan atau tahun. Sedangkan neraca BAZ ialah laporan posisi keuangan amil, laporan ini menyajikan suatu daftar yang disusun pada akhir tahun buku (neraca tahunan), dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan bentuk penyusunan neraca merupakan bentuk rekening (*Account Form*) yaitu asset ditempatkan di sebelah kiri dan kewajiban beserta modal (dalam hal ini disebut dana) ditempatkan di sebelah kanan. Laporan ini menyajikan harta atau asset, kewajiban dan dana pada saat tertentu/periode tertentu yang dinyatakan dalam bentuk uang/nilai uang. Untuk penyajian asset dan kewajiban tidak berbeda dengan laporan posisi keuangan institusi lainnya, tetapi tidak ada yang namanya modal, namun sebutannya adalah "Dana".⁵⁰

1. Aktiva/Aset

Definisi aset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai dimasa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang

⁴⁹*Ibid.*, h. 20

⁵⁰*Ibid.*, h. 21

sudah berlalu. Dalam hal pengorbanan yang diberikan adalah aktiva bukan uang, maka nilai yang dipakai adalah harga pasar barang yang diserahkan. Berbagai nilai yang sering dipakai dalam penilaian aktiva adalah:

- a) *Book Value* adalah harga buku yang diperoleh dari nilai perolehan historis dikurang nilai akumulasi penyusutan yang telah dibebankan kepada pendapatan.
- b) *Replacement Cost* adalah nilai barang yang dimaksud jika diganti dengan barang lain yang sama.
- c) *Selling Price* adalah harga penjualan.
- d) *Net Realizable* adalah harga jual dikurangi biaya penjualan atau dikurangi tingkat margin Normal.⁵¹

2. Passive (Utang/Kewajiban)

Utang merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar dengan uang atau aset lain kepada pihak lain pada waktu tertentu yang akan datang. Pemenuhan kewajiban ini dapat berupa pembayaran uang, penyerahan barang atau jasa kepada pihak yang telah memberikan pinjaman. Pada BAZ misalnya kewajiban jangka pendek yang terdiri dari biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban jangka panjang yang terdiri dari imbalan kerja jangka panjang.⁵²

⁵¹*Ibid.*, h. 22

⁵²*Ibid.*,

3. Dana

Pada lembaga atau institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS atau disebut juga sebagai Amil, maka penyusunan laporan posisi keuangan/neraca tidak menggunakan sebutan modal melainkan “Dana”. Terdapat empat pengelompokan “Dana” sebagai berikut:

- a) Dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat.
- b) Dana Infaq/sedekah adalah bagian non amil atas penerimaan Infaq dan sedekah.
- c) Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan Infaq/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- d) Dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.⁵³

⁵³ *Ibid.*, h. 23

Tabel 2.1
Laporan Posisi Keuangan Baz “xxx”
Per 31 desember 2xx2

Keterangan	RP	Keterangan	RP
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang Masih Harus Dibayar	xxx
Instrumen Keuangan	xxx		
Piutang	xxx	Kewajiban Jangka Panjang	
		Imbalan Kerja Jangka Panjang	xxx
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	xxx	Jumlah Kewajiban	xxx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	Saldo Dana	
		Dana Zakat	xxx
		Dana Infak/Sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		Dana Non Halal	xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	Xxx

Sumber: ED PSAK No. 109 Ikatan Akuntansi Indonesia

b. Laporan Perubahan Dana

Laporan sumber dan perubahan dana adalah perubahan posisi keuangan dari satu periode ke periode lainnya, misalnya perubahan kas. Laporan ini merupakan pelengkap laporan yang sudah ada yaitu neraca/laporan posisi keuangan. Tujuan disusunnya laporan sumber dan perubahan dana ini adalah untuk melengkapi pengungkapan informasi perubahan posisi keuangan dan melaporkan arus dana dari operasi. Pada BAZ, Laporan ini menyajikan berbagai penerimaan

dan penggunaan dan penyaluran untuk dana zakat dan dana Infaq/sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non halal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masing-masing mustahiq sesuai ketentuan syariah.⁵⁴

Table 2.2
Laporan Sumber dan Perubahan Dana BAZ “xxx”
Per 31 Desember 2xxx

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	xxx
muzakki entitas	xxx
muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Jumlah penyaluran dana zakat	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAQ/SEDEKAH	
Penerimaan	

⁵⁴*Ibid.*, h. 25

Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	Xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	xxx
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	-----
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana amil	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx

DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana nonhalal	xxx
Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx

Sumber: ED PSAK No. 109 Ikatan Akuntansi Indonesia

c. Laporan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- 2) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- 3) Penambahan dan pengurangan
- 4) Saldo awal
- 5) Saldo akhir⁵⁵

⁵⁵M Jusuf Wibisana-dkk, *Ibid.*, h. 14

Table 2.3
Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ “xxx”
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2xxx

	Saldo Awal	Pe nambah an	Pe ngurang an	Pe nyisih an	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infaq/sedekah-asset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infaq/sedekah-asset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber: ED PSAK No. 109 Ikatan Akuntansi Indonesia

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan penjelasan laporan keuangan ini memberikan penjelasan tambahan mengenai laporan keuangan utama yang belum dapat dijelaskan dalam tubuh laporan. Penjelasan ini dianggap penting karena dapat membantu pengambil keputusan dalam membacanya. Catatan dan penjelasan laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. Biasanya hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan ini adalah:

- 1) Kebijakan akuntansi, misalnya metode laporan konsolidasi, metode penyusutan, persediaan barang, pengakuan hasil, perubahan akuntansi, dan sebagainya.
- 2) Penjelasan pos penting seperti: perincian persediaan, aktiva/asset tetap, pembelian barang, dan lain sebagainya.
- 3) Penjelasan tentang komposisi, perkara dan Majelis Perpajakan.⁵⁶



⁵⁶Indah Sicilia, *Ibid.*, h. 27

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat berdirinya BAZNAS kota Bandar Lampung

Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung merupakan pengelola zakat yang dibentuk berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ. II OT/1585/2014 tanggal 3 September 2014 Tentang Tindak lanjut Pembentukan BAZNAS Daerah dan selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 954/1.06/HK/2015 Tanggal 15 September 2015 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Masa Bhakti 2015-2020 yang kemudian diperbarui sesuai dengan Masa Bhakti pengurus BAZNAS yaitu: Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 106/1.06/HK/2017 tanggal 16 Februari 2017 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2017-2022.⁵⁷

⁵⁷Dokumen resmi milik BAZNAS kota Bandar Lampung, dikutip pada tanggal 2 Oktober 2018

2. Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS kota Bandar Lampung

a. Visi

“MENJADI BAZNAS YANG AMANAH, TRANSPARAN DAN PROFESIONAL“

b. Misi

- 1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola zakat, infaq dan sodaqoh;
- 2) Melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan sodaqoh secara syar'i;
- 3) Memaksimalkan peran zakat, infaq dan shodaqoh dalam menanggulangi kemiskinan;
- 4) Meningkatkan fungsi teknologi sistem informasi manajemen zakat;
- 5) Mewujudkan data base muzakki dan mustahik.

c. Tujuan

1. Tujuan Mutu

- a) Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari UPZ (SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan swasta) dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan LAZ dan UPZ ;
- c) Memperkuat Tatakelola BAZNAS ;

- d) Meningkatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS;
- e) Mengaplikasikan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah;
- f) Mengembangkan sistem manajemen SDM yang berintegritas.

2. Kebijakan Mutu

- a) Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariat dan peraturan undang-undang yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik;
- b) Memberikan layanan terbaik bagi muzakki dan mustahik;
- c) Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan guna meningkatkan kesejahteraan mustahik;
- d) Membina, mengembangkan dan berkoordinasi dengan UPZ dan LAZ;
- e) Mengoptimalkan penerapan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan dan pendistribusian serta pendayagunaan ZIS secara transparan;
- f) Menerapkan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel yang sesuai dengan lembaga keuangan syariah;

- g) Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami.⁵⁸

3. Struktur Organisasi BAZNAS kota Bandar Lampung

H. A. RAHMAN MUSTAFA, SE.,MM.,Ak.,CA...KETUA

Drs.H.SARTIO,MM ...WAKIL KETUA I

H.M.RUSLAN ALI ...WAKIL KETUAI

H.FAIZIN, MA ...WAKIL KETUAI

H.YUSRAN EFFENDI, SE.,MM ...WAKIL KETUAI

PANDJI BUANA SRIOLAGO, SE.,MM ...STAFPELAKSANA

PURWOTO,SH.,MH ...STAF PELAKSANA

NURMA YULIA, S.Pd.I ...STAFPELAKSANA

RIZKI FITRIANSYAH, S.E ...STAF PELAKSANA

SUHADA HIDAYAT ...STAF PELAKSANA

4. Tempat dan Kedudukan Baznas kota Bandar Lampung

Dalam menjalankan usahanya Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung berkedudukan dan berkantor di Jl. Skala Bekhak No. 1, Enggal, Bandar Lampung.⁵⁹

⁵⁸*Ibid.*,

⁵⁹*Ibid.*,

B. Program Kerja BAZNAS kota Bandar Lampung

1. Bandar Lampung Peduli

Program ini akan berfokus pada kegiatan sosial dan kemanusiaan, sasaran utama dari program ini meliputi:

- a. Pemberian santunan kepada korban bencana alam, kebakaran rumah dan musibah lainnya.
- b. Pemberian santunan untuk keluarga yang terlantar.
- c. Pemberian santunan uang duka atau kerohanian untuk keluarga fakir miskin.
- d. Pemberian santunan bagi musafir dan mualaf.
- e. Pemberian santunan kepada panti jompo dan panti asuhan.⁶⁰

2. Bandar Lampung Taqwa

Yaitu program Badan Amil Zakat Nasional yang bergerak atau mewadahi bidang keagamaan dan kerohanian. Adapun program ini meliputi:

- a. Bantuan pembangunan sarana dan prasarana pondok pesantren, majelis ta'lim, masjid dan mushola, dimana tempat tersebut adalah wadah pembinaan umat sekaligus tempat media dakwah.
- b. Pemberian santunan atau dana pembinaan baik barang ataupun uang kepada para pejuang-pejuan Islam, diantaranya fisabilillah, muballigh, guru ngaji, dll.⁶¹

⁶⁰*Ibid.*,

⁶¹*Ibid.*,

3. Bandar Lampung Cerdas

Yaitu program BAZNAS Kota Bandar Lampung yang fokus pada bidang Pendidikan. Sasaran program ini meliputi:

- a. Bantuan beasiswa pelajar ataupun santri yang kurang mampu atau yatim piatu berprestasi.
- b. Bantuan alat perlengkapan belajar bagi pelajar ataupun santri yang kurang mampu.⁶²

4. Bandar Lampung Sehat

Yaitu program BAZNAS yang fokus pada bidang kesehatan. Sasaran utama program ini meliputi:

- a. Memberikan bantuan biaya pengobatan kepada masyarakat yang kurang mampu atau membutuhkan dengan klasifikasi tertentu.
- b. Memberikan bantuan mobilisasi/transportasi kepada masyarakat yang membutuhkan untuk berobat (dana disesuaikan dengan kebutuhan).⁶³

5. Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan

Program ini lebih berfokus kepada masalah zakat produktif. Sasaran utama program zakat produktif adalah pemberian bantuan modal usaha baik berbentuk dana ataupun barang usaha kepada kelompok-kelompok masyarakat ataupun perorangan, seperti:

- a. Pemberian bantuan modal usaha kelompok usaha kecil dan menengah (UKM).
- b. Pemberian bantuan modal usaha kelompok kerajinan dan profesi.

⁶²*Ibid.*,

⁶³*Ibid.*,

- c. Pemberian bantuan modal usaha kelompok nelayan.
- d. Pemberian bantuan modal usaha kelompok peternak.
- e. Serta rencana membentuk badan usaha milik BAZNAS.⁶⁴

C. Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Kota Bandar Lampung

Laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung adalah neraca, laporan perubahan dana dan laporan perubahan aset kelolaan. Dalam penyusunan laporan keuangan tersebut, Rizky Fitriansyah selaku pendistribusi dan pendayaguna zakat kota Bandar Lampung mengatakan bahwa untuk laporan keuangan Baznas kota Bandar Lampung sendiri untuk baru-baru ini baru akan menyesuaikan kedalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip PSAK No. 109. Karena untuk Baznas kota Bandar Lampung sendiri untuk proses pengauditannya saja baru dilakukan sekitar tahun 2017 kemarin, dan untuk proses kepengurusannya sendiri juga baru dilakukan sekitar tahun 2016 lalu. Karena memang sebelumnya baznas kota Bandar Lampung ini masih dibawah kepengurusan KEMENAG (Kementrian Agama) yang dimana pada saat itu lembaga baznas sendiri masih menjadi lembaga Bazda (Badan Amil Zakat Daerah), dan tentu untuk laporan keuangan Bazda sendiri masih tergabung dengan laporan keuangan KEMENAG.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ Rizki Fitriansyah, “Wawancara dengan Distributor dan Pendayaguna Zakat Baznas kota Bandar Lampung”, (Bandar Lampung; 26 November 2018)

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Bandar Lampung

1. Pertumbuhan Serta Kebijakan Adanya Penerimaan Dana Non Halal BAZNAS Kota Bandar Lampung

Pertumbuhan dana non halal pada BAZNAS kota Bandar Lampung dapat dikatakan cukup tinggi. Hal ini didasarkan pada ketergantungan BAZNAS kota Bandar Lampung dalam menggunakan fasilitas dari bank konvensional. Memang hal ini tidak bisa dihindari begitu saja, seperti yang telah diketahui bahwasannya para muzakki yang berada disekitar kota Bandar Lampung kebanyakan berasal dari pemerintah kota. Rizki Fitiansyah mengatakan bahwa di BAZNAS kota Bandar Lampung sendiri dalam lalu lintas pembayaran zakat, infak/sedekah, untuk para muzakki khususnya banyak sekali yang berasal dari pemerintah kota (seperti SKTD, dll). Jadi untuk menerima dana zakat, infak/sedekah itu lebih banyak yang melalui bank konvensional, walaupun ada sekitar 80% muzakki yang menggunakan jasa dari bank syariah (seperti BSM, BPRS, dll).⁶⁶ Meskipun BAZNAS kota Bandar Lampung tidak menggambarkan kenaikan pertumbuhan dana non halal secara khusus, namun dari hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa

⁶⁶*Ibid.*,

pertumbuhan dana non halal yang ada di BAZNAS Kota Bandar Lampung cukuplah tinggi.

Badan amil zakat (BAZ) adalah lembaga syariah yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi menerima dan menyalurkan dana zakat yang sesuai dengan ketentuan syariah dan dalam kegiatan operasionalnya jauh dari transaksi yang melanggar syariah Islam seperti transaksi ribawi. Adanya akun dana non halal pada laporan keuangan BAZ akan menimbulkan stigma yang negatif dimasyarakat tentang kepatuhan BAZ terhadap syariah. Terutama bagi masyarakat awam akan menimbulkan anggapan bahwa ada sebagian harta yang diterima atau disalurkan oleh BAZ itu tidak halal atau haram. Oleh sebab itu, akun dana non halal seharusnya tidak ada di laporan keuangan BAZ.⁶⁷

Tidak adanya akun dana non halal ini bukan berupa menyembunyian informasi keuangan seperti yang terjadi pada BAZNAS Kota Bandar Lampung, melainkan benar-benar tidak ada penerimaan dana non halal. Penerimaan dana non halal ini dapat dihindari manakala BAZ memiliki komitmen untuk tidak menggunakan fasilitas bank konvensional. Adanya perubahan ketentuan dana non halal yang tertuang dalam ED PSAK109 seperti yang tertuang dalam PSAK 109 dikarenakan terjadinya perdebatan yang panjang di antara kalangan ulama Indonesia. Bahkan sampai saat ini ketika PSAK 109 juga sudah disahkan.

⁶⁷*Ibid.*, h. 41

Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum juga mengeluarkan Fatwa tentang Dana Non Halal pada BAZ. Adapun bunyi ED PSAK 109 dan PSAK 109 adalah sebagai berikut;⁶⁸ “Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dan infak/sedekah dan dana amil zakat. Aset non halal disalurkan sesuai dengan prinsip syariah. Amil harus mengungkapkan keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya”, sedangkan dalam PSAK Nomor 109 hanya menjelaskan; “Amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.”

Dalam sebuah artikel yang ditulis dan dimuat dalam situs web Forum Zakat, dijelaskan bahwa lambatnya pengesahan PSAK Zakat 109 disebabkan masih adanya beberapa hal penting yang belum disepakati yaitu:

⁶⁸ *Ibid.*, h. 42

- a. Penerima dan penerimaan zakat,
- b. Penyaluran zakat,
- c. Dana non halal.⁶⁹

Pembahasan dana non halal yang meliputi bagaimana perolehan dana non halal dan bagaimana penggunaan dana non halal menurut IAI dan MUI serta pengawas LAZ, masuk pada wilayah fikih sehingga sangat sulit untuk mencapai kata mufakat. Akhirnya disepakati agar ada satu pendapat yang dijadikan pedoman, maka perlu dimintakan fatwa kepada MUI. Sedangkan mengenai istilah dana non halal, mereka semua sepakat untuk dirubah. Sebab istilah ini dirasa tidak mencerminkan misi syariah.⁷⁰ Meskipun istilah dana non halal ini sudah ada sejak lama dan masuk di dalam dunia perbankan. Namun, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, infak dan sedekah, maka istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum.

Alasan lain kenapa dirubah menjadi dana untuk kepentingan umum, karena pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan). Dana non halal yang dimaksudkan di sini adalah dana yang diperoleh dari bank konvensional dimana tidak menjadi suatu kesengajaan untuk disimpan melainkan sebuah fasilitas yang disediakan bagi muzakki untuk mempermudah melakukan transaksi.⁷¹

⁶⁹*Ibid.*,

⁷⁰*Ibid.*,

⁷¹*Ibid.*,

Pengawas BAZ sepakat bahwa ketentuan tentang apa saja yang bisa diakui sebagai dana non halal dan untuk apa saja dana non halal ini digunakan diserahkan sepenuhnya kepada MUI untuk dikeluarkan Fatwa tentang Dana Non Halal. Namun kenyataannya sampai desember 2018 ini, MUI belum juga mengeluarkan fatwa Dana Non Halal. Hal ini mengindikasikan adanya masalah yang rumit ketika BAZ menerima dana non halal sehingga cukup sulit untuk menentukan makna dan batasan darurat dalam menerima atau menggunakan dana non halal tersebut.⁷²

Adanya perubahan ketentuan definisi sumber, alasan, dan penyaluran dana non halal pada ED PSAK menjadikan ketentuan pengungkapan jika terdapat dana non halal seperti yang ada pada PSAK ini menunjukkan ikhtiar IAI untuk menghapus penerimaan dana non halal. Jika dianalisis, aturan ini bisa jadi merupakan proses pelarangan penerimaan dana non halal oleh PSAK yang meniru seperti proses pelarangan riba oleh Allah yang dilakukan secara bertahap. Sama halnya dengan ED PSAK menjadi PSAK, awalnya di ED PSAK dijelaskan mengenai definisi sumber dana non halal yakni bisa berupa bunga atau jasa giro. Kemudian digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariah yakni untuk sarana umum diluar kebutuhan konsumtif dan fasilitas ibadah.⁷³

Alasan adanya dana non halal ini karena darurat. Baru kemudian PSAK secara halus menyebutkan jika ada dana non halal, maka harus diungkapkan mengenai sumber, alasan, penyaluran, dan jumlah dana non

⁷²*Ibid.*,

⁷³*Ibid.*,

halal. Namun apabila tidak ada penerimaan dana non halal itu sendiri jauh lebih baik. Tidak menutup kemungkinan nantinya dalam PSAK memang tidak menghendaki adanya dana non halal. Tentunya penghapusan penerimaan dana non halal itu harus bertahap dan terarah. Oleh sebab itu, seharusnya BAZ dari sekarang harus melakukan persiapan lebih awal supaya nantinya tidak membuka rekening di bank konvensional karena nantinya menimbulkan dana non halal.⁷⁴

Mengenai keputusan supaya BAZ tidak membuka rekening bank konvensional tentunya diperlukan sebuah persiapan yang matang antara lain:

- 1) BAZ harus memahamkan donatur dan calon donatur mengenai hukum riba dan berinteraksi dengan lembaga riba seperti membuka rekening di bank konvensional yang menimbulkan penerimaan dana non halal hukumnya adalah haram. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan seminar, misalnya dengan tema dibawah naungan keberkahan syariat Islam, indahnya hidup tanpa riba, dan lain sebagainya.⁷⁵ Forum Zakat (FOZ) seharusnya mampu membuat kesepakatan terhadap semua BAZ agar secara serentak dan bertahap tidak membuka rekening di bank konvensional misalnya dengan mencetuskan gerakan bebas ribawi atau gerakan bebas dana non halal. Jika hanya di lakukan oleh salah satu BAZ saja kemungkinan besar akan terasa berat.

⁷⁴*Ibid.*, h. 43

⁷⁵*Ibid.*,

2) Bank Indonesia dan Persatuan Bank Syariah Indonesia (PBSI) harus mampu menstimulus Bank Syariah di Indonesia agar meminimalisir kekuarangan-kekurangan yang dimiliki agar mampu memberikan fasilitas yang minimal setara dengan fasilitas Bank Konvensional sehingga ketika BAZ hanya membuka rekening syariah, donatur mereka sudah cukup puas dalam pelayanan fasilitas bank syariah dalam menyalurkan zakatnya. Itulah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengawal sebuah pembaharuan pada BAZ agar terbebas dari unsur dana non halal. Di awal-awal perubahan tersebut pastinya BAZ akan mengalami beberapa kesulitan untuk menyesuaikan diri. Didalam surat Al-Ankabut ayat 2-3, Allah menegaskan komitmen orang-orang yang beriman. Dalam hal ini, Allah juga ingin menguji komitmen BAZ untuk patuh terhadap aturan syariah. Berikut adalah isi dari QS. Al - Ankabut ayat 2-3:⁷⁶

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ لَقَدْ فْتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

Artinya: “Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?”

“Dan sungguh, Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.” (QS. Al - Ankabut: 2-3).

⁷⁶*Ibid.*, h. 44

Pada akhirnya semua berpulang kepada komitmen BAZ tersebut untuk mengelola dana Ziswaf sesuai tuntunan Syariah. Sangat diharapkan BAZNAS kota Bandar Lampung mampu menjadi BAZ yang mengawasi tidak membuka rekening syariah dari fasilitas pelayanan jasa transfer untuk donatur sehingga kedepan dalam mengelola keuangannya BAZNAS kota Bandar Lampung tidak memiliki penerimaan dana non halal. Semoga ayat Al Quran berikut tadi bisa menjadi motivasi bagi BAZNAS Kota Bandar Lampung untuk berubah menjadi lebih baik lagi.

2. Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal BAZNAS Kota Bandar Lampung

BAZNAS Kota Bandar Lampung sendiri setiap bulannya membuat laporan perubahan dana yang berisi informasi tentang penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan wakaf serta penerimaan dana non halal jika ada. Adapun laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga amil zakat haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian. Termasuk dalam hal perlakuan akuntansi dana non halal harus memenuhi prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah (kas) ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan tereflesi dalam laporan keuangan. Jadi pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak.

Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan statemen keuangan. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah (kas) yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi. Pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan atau menjelaskan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statemen keuangan utama. Penyajian adalah menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Termasuk dalam pengertian pengungkapan ini adalah masalah penentuan masuk tidaknya informasi yang bersifat kualitatif ke dalam seperangkat statement keuangan.⁷⁷

BAZNAS Kota Bandar Lampung mengakui atau mencatat dana non halal sesuai tanggal yang ada di rekening koran. Jumlah yang akan dilekatkan pada akun dana non halal juga sesuai dengan rekening koran tersebut. Setiap bulan penerimaan dana non halal kemudian diakumulasikan dan disajikan dalam laporan perubahan dana.⁷⁸

Berdasarkan PSAK 109 pencatatan akuntansi organisasi pengelola zakat menggunakan penerimaan zakat diakui pada saat kas atau non kas diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana

⁷⁷ Suwardjono, *“Teori Akuntansi: Perekrayasaan Pelaporan Keuangan”*, (Yogyakarta; 2008)

⁷⁸ Rizki Fitriansyah, *Loc. Cit.*,

zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas atau sebesar nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas atau sebesar nilai wajar jika dalam bentuk non kas.⁷⁹ Pada PSAK 109 tidak menjelaskan ketentuan pengakuan dan pengukuran dana wakaf dan dana non halal. Hal ini tidak disebutkan karena kedua dana ini tidak wajib harus ada, namun jika terdapat dana wakaf dan dana non halal dalam perlakuan pengakuan dan pengukurannya bisa disamakan dengan dana zakat atau dana infak/sedekah. Dana wakaf diakui sebagai penambah dana wakaf sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas atau diakui sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset non kas. Begitu juga dana non halal diakui sebagai penambah dana non halal sebesar jumlah yang diterima.⁸⁰

BAZNAS kota Bandar Lampung dalam pengakuan dana non halal belum sesuai dengan PSAK 109 karena penerimaan dana non halal tidak sebagai penambah dana non halal melainkan sebagai penambah dana amil sebesar jumlah yang diterima. Rizki Fitriansyah mengatakan bahwa hal seperti ini terjadi karena sebelumnya lembaga BAZNAS sendiri awalnya merupakan lembaga Badan Amil Zakat Daerah dibawah kepemimpinan KEMENAG yang tentu saja pada saat itu prinsip penyusunan laporan keuangannya sendiri belum sesuai dengan prinsip PSAK No. 109. Akan

⁷⁹ Ahmad Roziq–Widya Yanti, *Loc. Cit.*, h. 33

⁸⁰ *Ibid.*,

tetapi untuk sekarang, kami sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip PSAK No.109, yang dimana penerimaan dana non tersebut seharusnya diakui sebagai penambah dana non halal bukan penambahan dana amil.⁸¹

3. Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal BAZNAS Kota Bandar Lampung

Dana non halal BAZNAS Kota Bandar Lampung tidak disajikan terpisah dengan dana lainnya. Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung penerimaan dana non halal masih dicampur dengan dana amil dengan menggunakan nama akun saldo penerimaan dana non syariah di jurnal laporan perubahan dana. Kebijakan penyajian dana non halal pada BAZNAS Kota Bandar Lampung disajikan hanya dalam jurnal laporan perubahan dana saja, belum dijelaskan kedalam neraca. Pada laporan perubahan dana, dana non halal masuk kedalam akun penerimaan dana amil, dengan begitu maka akan jelas berapa banyak dana yang masuk setiap tahunnya. Dana non halal pada BAZNAS Kota Bandar Lampung bersumber dari penerimaan bunga bank dan jasa giro. Bunga bank dan jasa giro adalah jenis penerimaan yang tidak bisa dihindari karena adanya rekening bank konvensional maka secara otomatis akan muncul dana non halal sehingga alasan adanya dana non halal pada BAZNAS Kota Bandar Lampung adalah dikarenakan kondisi yang darurat.⁸²

⁸¹ Rizki Fitriansyah, *Loc. Cit.*,

⁸² Rizki Fitriansyah, *Ibid.*,

Penggunaan rekening bank konvensional tidak bisa dihindari oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung, hal ini dikarenakan BAZNAS Kota Bandar Lampung harus mampu memberikan fasilitas dan kemudahan donatur untuk menyalurkan zakat nya. Dana yang terhimpun dari donatur pada BAZNAS Kota Bandar Lampung sekitar 90% menggunakan rekening bank konvensional dan hanya 10% yang menggunakan rekening bank syariah. Namun demikian BAZNAS kota Bandar Lampung hanya menggunakan rekening bank konvensional untuk menghimpun penerimaan dana dari donatur dan kepentingan lalu lintas para muzakki dalam membayar zakat, apabila dalam rekening tersebut jumlahnya sudah mencapai jumlah tertentu maka akan di kumpulkan menjadi satu di Bank Lampung yang merupakan bank induk BAZNAS Kota Bandar Lampung.⁸³

Pada paragraf pertama PSAK 109 menyebutkan ketentuan mengenai penyajian dana zakat dan infak/sedekah yakni amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Untuk dana-dana lain yang tidak disebutkan misalnya dana non halal dan dana wakaf tetap harus disajikan secara terpisah dengan dana yang lainnya. Dana non halal pada BAZNAS Kota Bandar Lampung dicatat dan diakui sebagai akun yang terpisah dari akun lainnya. Namun pada laporan yang dipublikasikan, dana non halal dimasukkan ke dalam dana amil. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi menurunnya kepercayaan para donatur dan muzakki yang sebagian besar

⁸³ *Ibid.*,

adalah pegawai pemerintah kota yang untuk kepentingan sehari-hari sudah pasti menggunakan jasa rekening dari bank konvensional.

Adanya perubahan penulisan pada laporan yang asli dengan yang dipublikasikan akan mengakibatkan informasi keuangan yang diterima masyarakat menjadi tidak tepat dan sesuai syariat itu dilarang meskipun dengan niatan yang baik. Sesuai ketentuan hukum asal (ushul fiqh) bahwa niat baik tidak dapat melepaskan yang haram. Tidak memberikan informasi sesuai dengan kenyataan itu berarti tidak jujur dan itu dilarang dalam Islam meskipun dalam hal kebaikan. Ada tiga jenis kebohongan yang memang diperbolehkan dalam Islam dan berbohong dalam memberikan informasi keuangan itu tidak dibenarkan dalam Islam meskipun tujuannya baik. Islam memberikan penghargaan setiap hal yang dapat mendorong untuk berbuat baik, tujuan yang mulia dan niat yang bagus, baik dalam perundang-undangnya maupun dalam seluruh penghargayannya. Untuk itulah maka Nabi Muhammad SAW bersabda:⁸⁴

في الواقع ، يجب أن تكون كل الصدقة مصحوبة بنوايا (الإخلاص بسبب الله) ،
ويتم الحكم على الجميع وفقاً لنية

“Sesungguhnya semua amal itu harus disertai dengan niat (ikhlas karena Allah), dan setiap orang dinilai menurut niatnya.” (HR. Bukhari)

⁸⁴ Ahmad Roziq-Widya Yanti, *Ibid.*, h. 34

من يسعى للحصول على القرب الحلال بنية منع نفسه من التسول ، ويسعى جاهدة لتوفير أسرته ، حتى يتمكن من المشاركة في الرحمة (مساعدة جاره) ، ثم في يوم من الأيام سوف يجتمع الله (في الآخرة) بينما وجهه مثل القمر اكتمال القمر

"Barangsiapa mencari rezeki yang halal dengan niat untuk menjaga dirisupaya tidak minta-minta, dan berusaha untuk mencukupi keluarganya, sertasupaya dapat ikut berbelas kasih (membantu tetangganya), maka kelak diaakan bertemu Allah (di akhirat) sedang wajahnya bagaikan bulan di malampurnama." (Riwayat Thabarani).

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan BAZNAS kota Bandar Lampung, perlakuan dana non halal tersebut dalam hal penyajian belum sesuai dengan PSAK 109. Oleh karena itu, seharusnya BAZNAS kota Bandar Lampung menyajikan informasi dana non halal pada laporan keuangan secara terpisah dari akun zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dalam PSAK 109 paragraf ketiga menyebutkan bahwa organisasi pengelola zakat mengungkapkan keberadaan dana non halal jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. Sumber dana non halal yang diperbolehkan oleh syariah saat ini adalah bunga bank dan jasa giro. Dalam hukum asal muamalah segala sesuatu hukumnya boleh dilakukan kecuali ada ayat alquran atau al hadits yang melarangnya.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid.*, h. 35

Fatwa DSN MUI No. 1 tahun 2004 dengan tegas telah melarang adanya praktek riba. Pada tanggal 16 Desember 2003, Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktek bunga adalah haram. Namun, Islam memang agama yang sempurna dan universal, meskipun riba itu dilarang akan tetapi dalam kondisi darurat memungut hasil riba itu masih diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan QS. Al An'am: 119:⁸⁶

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.” (Al An'am; 119)

Maksud dari ayat diatas ialah mengenai hal-hal yang sudah jelas dilarang dalam hukum syariat islam. Namun dalam konteks ini yaitu

⁸⁶*Ibid.*, h. 36

tentang penerimaan dana non halal dan riba bisa dipahami bahwa hal-hal yang dilarang Allah (riba) boleh kita memungut hasilnya asalkan pada saat tersebut memang benar-benar dalam kondisi yang darurat. Kondisi darurat ini bisa diibaratkan dengan kata “terpaksa” pada ayat tersebut. Sesungguhnya hanya Allah lah yang maha mengetahui makna terpaksa dalam perkara tersebut, dan hanya Dia yang akan menangani perhitungan serta perbuatan (dosa) dan balasan untuk apa-apa yang telah mereka lakukan.

Potensi zakat Indonesia pada beberapa tahun belakangan ini sebesar 2,9 Trilyun namun pencapaian penghimpunan dana zakat oleh LAZ/BAZ hanya mencapai 700 milyartiap tahunnya. Sampai sekarang antara potensi zakat dengan pencapaian penghimpunan zakat masih jauh selisih jumlahnya. Oleh karena itu, setiap organisasi pengelola zakat harus melakukan inovasi program dan pelayanan optimal kepada muzaki dan donatur agar mereka dengan mudah bisa menyalurkan zakat dan donasinya.⁸⁷ Salah satu pelayanan optimal terhadap donatur adalah dengan membuka rekening bank konvensional. Sesuai kondisi realita, donatur zakat lebih banyak menggunakan jasa rekening bank konvensional dibandingkan jasa rekening bank syariah. Sehingga meskipun adanya sikap organisasi pengelola zakat membuka rekening bank konvensional bertentangan dengan semangat instrumen ekonomi Islam yakni optimalisasi

⁸⁷ *Ibid.*,

zakat dan pelarangan riba, baik LAZ/BAZ tidak dapat menghindar dari menggunakan jasa bank konvensional.

Kondisi ini memang sangat dilematis, oleh karena itu meskipun LAZ/BAZ diperbolehkan membuka rekening bank konvensional tapi LAZ/BAZ hanya menggunakannya untuk jasa penghimpunan dana saja dan LAZ/BAZ tidak boleh menerima penerimaan dana non halal dari donatur. Misalnya ada seorang donatur yang menabung di bank konvensional, dia tidak mau mengonsumsi bunga bank tersebut. Oleh karena itu, dia menitipkan kepada LAZ/BAZ untuk disalurkan bunga tersebut maka LAZ/BAZ tidak boleh menerima bunga tersebut karena hanya dari harta yang halal saja yang bisa dikeluarkan zakatnya.⁸⁸

Pendapatan non halal (dana non halal) adalah bukan merupakan pendapatan yang secara sengaja diterima oleh entitas syariah seperti hasil korupsi, pencurian, perampokan yang diketahui sebelumnya oleh entitas syariah tersebut. Pendapatan non halal ini diterima oleh entitas syariah karena secara sistem entitas syariah otomatis menerima seperti bunga dari investasi konvensional (tabungan dan deposito di bank konvensional). Entitas syariah berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional dalam rangka lalu lintas keuangan dan pembayaran karena secara sistem keuangan belum bisa diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah sehingga statusnya adalah darurat. Jika dikemudian hari lembaga keuangan syariah sudah bisa melayani transaksi tersebut, maka disarankan agar

⁸⁸ *Ibid.*,

hubungan dengan lembaga keuangan konvensional segera dihentikan untuk menghindari transaksi ribawi.⁸⁹

Menurut Forum Zakat (FOZ) dana non halal yang dimaksudkan di sini adalah dana yang diperoleh dari bank konvensional dimana tidak menjadi suatu kesengajaan untuk disimpan melainkan sebuah fasilitas yang disediakan bagi muzaki untuk mempermudah melakukan transaksi. Dalam ED PSAK Nomor 109 juga telah dijelaskan, bahwa dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil, yang berarti aset non halal yang disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.⁹⁰

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, dana non halal harus disalurkan sesuai ketentuan syariah yaitu menghindari adanya konsumsi dan fasilitas ibadah. Biasanya dana non halal didistribusikan untuk proyek sosial seperti pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, dan agenda sosial lainnya. Dana non halal ini akan masuk dalam dana kebajikan, namun harus disajikan secara terpisah dari dana yang halal. Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam satu hal yang bermanfaat bagi kaum Muslimin

⁸⁹*Ibid.*, h. 37

⁹⁰*Ibid.*,

dari pada membiarkannya berpindah ke tangan kaum kafir yang akhirnya akan mereka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan Allah.⁹¹

Dari beberapa penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan kriteria dana non halal adalah sebagai berikut:

1. Transaksi ribawi yang terjadi karena terpaksa atau darurat.
2. Darurat adalah kondisi dimana butuh untuk segera dilakukan dan ketikadilakukan tidak boleh berlebihan.
3. Transaksi ribawi yang muncul secara sistemik.
4. Bukan merupakan dana haram yang terselubung.

Untuk sumber dana non halal BAZNAS kota Bandar Lampung sendiri sudah sesuai dengan kriteria dana non halal yakni bersumber dari penerimaan bunga bank dan penerimaan jasa giro. Bunga bank dan jasa giro adalah jenis penerimaan yang tidak bisa dihindari karena adanya rekening bank konvensional maka secara otomatis akan muncul dana non halal. Akan tetapi sumber penerimaan dana non halal pada BAZNAS kota Bandar Lampung belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dikarenakan penerimaan dana non halal yang bersumber dari bunga bank milik donatur sendiri belum dihindari oleh BAZNAS kota Bandar Lampung, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria dana non halal yang ada di PSAK 109. Oleh sebab itu, BAZNAS kota Bandar Lampung seharusnya hanya menerima penerimaan bunga dari para

⁹¹*Ibid.*,

muzakki saja, sedangkan penerimaan bunga (dana non halal) dari donatur seharusnya tidak boleh diterima untuk alasan apapun.

B. Pendapat Adanya Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Bandar Lampung Bagi Muzaki

Adanya akun dana non halal pada lembaga zakat yang notabennya merupakan lembaga yang berbasis syariah biasanya menimbulkan persepsi yang berbeda khususnya dikalangan orang awam. Persepsi yang dimaksud ialah makna dari dana non halal itu sendiri, mungkin banyak pemikiran orang awam mengatakan bahwa dana non halal itu merupakan dana yang haram, baik dari cara mendapatkannya maupun untuk penggunaannya. Disini peneliti mengumpulkan beberapa muzakki untuk mengetahui pendapat dari mereka tentang bagaimana masalah tersebut, dari beberapa pendapat para muzakki tersebut rata-rata jawaban mereka hampir sama tentang adanya penerimaan dana non halal ini.

Salah satu dari pendapat para muzakki tersebut ialah Rizki Fitriansyah yang sekaligus mewakili pendapat dari beberapa muzakki, beliau mengungkapkan bahwa “kalau untuk muzakki sendiri memandang dana non halal itu ya berarti dana non syariah yang keluar dari prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Sebenarnya semua itu tergantung dari transparansi lembaga tersebut saja, asalkan dana tersebut tidak dipakai untuk kepentingan pribadi

dalam arti tidak disalah gunakan. Karena sebenarnya dana tersebut kan termasuk dana social yang digunakan untuk kepentingan social juga.”⁹²

Sejalan dengan pendapat dari Rizky Fitriansyah, Siska Riani mengungkapkan pendapatnya mengenai hal tersebut. Beliau pun mengatakan bahwasannya dana non halal sendiri pasti muncul jika lembaga BAZNAS menggunakan jasa dari bank konvensional, hal ini tidak bisa dihindari dan memang bukan untuk dihindari. Maksudnya ialah yang diharapkan dari munculnya dana non halal ini, pihak BAZNAS akan bisa lebih bijak untuk menggunakan hasil dari penerimaan dana tersebut untuk hal-hal yang sesuai dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat.⁹³

Namun ada dari beberapa muzakki juga yang baru mengetahui akan adanya penerimaan dana non halal tersebut. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diartikan bahwa beberapa dari mereka yang baru tahu akan hal ini sebelumnya tidak mengetahui adanya penerimaan dana non halal pada BAZNAS. Menurut pandangan mereka tugas dari lembaga BAZNAS ini hanyalah mengumpulkan serta menyalurkan kembali dana zakat, infaq dan sedekah kepada orang yang berhak menerima dan pasti jauh dari penerimaan semacam riba dll. Hal ini wajar jika dilihat dari bentuk laporan keuangan BAZNAS sendiri yang memang masih belum transparan tentang pendapatan dana non halalnya, sehingga banyak dari para muzakki yang tidak mengetahui akan hal tersebut.

⁹²*Ibid.*,

⁹³ Siska Riani, “Wawancara Selaku Muzaki Baznas Kota Bnadar Lampung”, (Bandar Lampung; 6 Mei 2019)

M Ruslan Ali dan Suhada Hidayat yang berprofesi sebagai wiraswasta dan karyawan swasta ini mengungkapkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan; “jujur sebenarnya saya baru mengetahui akan hal ini, difikiran saya lembaga BAZNAS yang merupakan lembaga entitas sayriah pastilah jauh dari penerimaan dana non halal, riba, dsb. Akan lebih efektif dan cepat juga jika saya membayar zakat melalui lembaga BAZNAS ini sendiri karena mengingat pekerjaan saya yang begitu sibuk sehingga mungkin tidak sempat untuk mengurus zakat dll. Namun setelah saya menerima pertanyaan ini saya jadi berfikir ulang, saya kira selama ini lembaga BAZNAS itu aman dari hal semacam ini”.⁹⁴

“Sebenarnya saya tidak begitu faham betul akan hal ini, yang saya tau ialah lembaga BAZNAS itu sebagai lembaga pendistribusian dana zakat yang pasti aman dan terpercaya. Sebelumnya memang karena ketidak tahuan saya tentang lembaga BAZNAS ini dulu saya membayar zakat sendiri, namun setelah saya tau dan saya berfikir bahwa akan lebih efektif dan aman jika saya membayar zakat menggunakan lembaga BAZNAS tersebut tetapi saya tidak tau kalau ada penerimaan dana non halal didalamnya. Kemungkinan penerimaan dana non halal disini tidak seperti apa yang difikirkan banyak orang, dan jika dilihat dari tujuan penggunaannya juga sepertinya baik selama tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu”.⁹⁵

⁹⁴M Ruslan Ali, “Wawancara selaku muzaki yang berprofesi sebagai wiraswata”, (Bandar Lampung; 28 November 2018)

⁹⁵ Suhada Hidayat, “Wawancara Selaku Muzaki Yang Berprofesi Sebagai Karyawan Swasta”, (Bandar Lampung; 29 November 2018)

Yuniarto juga ikut mengutarakan pendapatnya terkait masalah ini. Beliau sebenarnya baru menggunakan jasa dari lembaga Baznas sejak 2 tahun terakhir, hal ini sekaligus menjadi masukan sekaligus saran untuk lembaga BAZNAS dari sudut pandang muzakki yang bisa dibilang masih baru untuk menggunakan jasa dari BAZNAS. Awalnya dia mengatakan bahwa dia tidak terlalu faham terkait masalah yang mendetail seperti ini, dia mengatakan bahwa lembaga BAZNAS merupakan suatu lembaga yang khusus untuk penerimaan serta penyaluran dana zakat saja. Mengenai penerimaan dana non halal yang ada didalam hasil laporan keuangan BAZNAS tersebut beliau hanya berpesan untuk tidak disalah gunakan, dan dia berharap bahwa munculnya dana non halal ini benar-benar bukan dari sesuatu yang diharamkan oleh hukum syariat islam. Maksudnya ialah meskipun penerimaan dana non halal ini seharusnya tidak bisa diterima, namun pasti sudah ada yang mengatur terkait hal seperti ini agar tidak lebih terjerumus lagi kedalam larangan syariat-syariat islam.⁹⁶

Kembali lagi bahwasannya penerimaan dana non halal berasal dari semua penerimaan kegiatan jasa giro atau bunga bank yang berasal dari lembaga keuangan konvensional. Dalam kasus ini penerimaan dana non halal dapat terjadi karena suatu kondisi yang darurat, khususnya untuk lembaga BAZNAS Kota Bandar Lampung yang mau tidak mau didalam kegiatan penerimaan dana zakatnya masih bergantung pada lembaga keuangan

⁹⁶ Yuniarto, "Wawancara Selaku Muzaki Baznas Kota Bandar Lampung", (Bandar Lampung; 6 Mei 2019)

konvensional yang mana hal tersebut sudah dijelaskan pada paragraph sebelumnya.

Akan tetapi agama Islam memandang hal ini dengan tegas, sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi beliau mengungkapkan “Masalah haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Islam menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga. Oleh karena itu siapa yang mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencana-rencana yang lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafaat baginya sehingga dengan demikian dosa haramnya itu harus dihapus.” Disini perlu digaris bawahi bahwa BAZNAS Kota Bandar Lampung menerima dana non halal tersebut dalam kondisi yang darurat, darurat adalah suatu keadaan emergency dimana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat, akan membawanya kejurang kehancuran atau kematian.⁹⁷

Munculnya pendapat dari beberapa muzakki yang mengatakan bahwa tidak seharusnya lembaga BAZNAS menerima pendapatan dana non halal dikarenakan didalam menerapkan akuntansi dana non halalnya BAZNAS Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya menyesuaikan dengan peraturan PSAK No 109, dimana penerimaan bunga bank, jasa giro dan sebagainya

⁹⁷Nur Hisamuddin - Iva Hardianti Sholikha, *Ibid.*

diakui sebagai dana non halal serta penerimaan dana non halal oleh amil dipisahkan dari dana zakat, infaq/sedekah. Dana non halal ini dipisahkan dari aset pada laporan keuangan amil karena aset dana non halal harus dikeluarkan/disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.

Didalam peraturan PSAK No 109 sudah dijelaskan terkait penerimaan dana non halal ini, bahwasannya amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal tersebut jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan serta jumlahnya. BAZNAS kota Bandar Lampung memang sudah mengungkapkan atas keberadaan dana non halalnya, akan tetapi penerimaan tersebut dicatat sebagai penambahan dana bagi amil bukan sebagai penambahan dana untuk dana non halal itu sendiri. Dan juga penyajiannya belum dilakukan secara terpisah dan tidak diungkapkan kedalam laporan keuangan neraca sehingga menimbulkan kesan seolah-olah lembaga BAZNAS kota Bandar Lampung tidak transparan dalam masalah hasil laporan keuangannya. Tentu saja disini kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan para muzakki yang beranggapan seperti tersebut, karena memang sudah jelas bahwasannya BAZNAS kota Bandar Lampung didalam menyusun hasil laporan keuangannya belum sesuai dengan peraturan PSAK No 109. Hal ini bukan tanpa alasan dilakukan dengan sengaja oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung, telah dijelaskan alasan pada paragraf sebelumnya mengapa BAZNAS Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya mengacu terhadap peraturan PSAK No 109. Akan tetapi pihak BAZNAS

Kota Bandar Lampung berjanji untuk segera menyusun hasil laporan keuangannya sesuai dengan peraturan PSAK No 109.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

1. BAZNAS kota Bandar Lampung dalam penyusunan laporan keuangan untuk hasil laporan keuangan pada tahun 2017 lalu belum mengacu pada pedoman akuntansi zakat yakni PSAK Nomor 109. Hal ini dikarenakan BAZNAS kota Bandar Lampung sendiri sebelumnya memang belum berdiri sendiri sebagai suatu lembaga keuangan zakat nasional melainkan masih dibawah kepengurusan KEMENAG. Akan tetapi untuk tahun yang sekarang BAZNAS kota Bandar Lampung sedikit demi sedikit mulai mengacu kepada prinsip PSAK No. 109 dalam membuat hasil laporan keuangannya. Dan dalam hal perlakuan dana non halal, BAZNAS kota Bandar Lampung sendiri belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perlakuan akuntansi dana non halal yang ada di PSAK 109. Perlakuan akuntansi dana non halal meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan ini terdiri dari pengungkapan jumlah, sumber, alasan dan penyaluran dana non halal, sedangkan untuk BAZNAS kota Bandar Lampung sendiri hanya mengungkapkan

penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah saja, bahkan untuk pengungkapan dana non halal nya belum dilakukan secara terpisah.

2. Terkait implikasi adanya penerimaan dana non halal bagi para muzakki BAZNAS Kota Bandar Lampung berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwasannya terdapat pro dan kontra akan hal ini. Beberapa diantara mereka menganggap tidak masalah adanya penerimaan dana non halal selama dana tersebut digunakan dengan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam PSAK No. 109, tidak dimanfaatkan oleh sekelompok individu yang hanya memikirkan hasrat serta nafsu atas kepentingan pribadinya saja. Namun ada dari beberapa dari para muzakki yang ragu akan hal ini, dikarenakan kurangnya pengetahuan dan transparansi dari pihak Baznas itu sendiri, sehingga terdapat miss komunikasi pengetahuan akan adanya penerimaan dana non halal tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi BAZNAS kota Bandar Lampung dalam memperlakukan akuntansi dananon halal yang sesuai dengan PSAK No. 109. Diharapkan nantinya dapat segeraditerapkan oleh BAZNAS kota Bandar Lampung serta untuk lebih transparan lagi didalam mengungkapkan penerimaan dana non halal pada laporan keuangannya.

2. Dalam melakukan penelitian selanjutnya diharapkan penulis dapat terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan dan penyaluran dana non halal serta mempunyai referensi lebih banyak dan mengikuti perkembangan informasi yang terkini. Referensi tidak terbatas hanya pada BAZ lokal dari Indonesia saja tapi juga menggunakan referensi BAZ dari Luar Negeri. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan lebih transparan lagi dengan data-data yang lebih akurat dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Roziq-Widya Yanti, *“Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat”*, Vol. 1 No.2, Surabaya; 2011
- Arikunto-Suharsini, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*, Jakarta: PT. Rinex Cipta, 2010
- Cholid Narbuko, Dkk, *“Metodologi Penelitian “*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Didin Hafhiduddin, *“Zakat Dalam Perekonomian Modern”*, Jakarta; Gemma Insani, 2002
- Dokumen Resmi Milik BAZNAS Kota Bandar Lampung, Dikutip Pada Tanggal 2 Oktober 2018
- Indah Sicilia, *“Bagan Pembahasan Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Amil Sebagai Organisasi pengelola ZIS”*, Pekanbaru; 2012
- Indah Sicilia, *“Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) kota Pekanbaru”*, Pekanbaru; 2012
- Lexy J. Moloeng, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- M Jusuf Wibisana-Dkk, *“Exposure Draft PSAK 109”*, Jakarta 26 Februari 2008
- M Ruslan Ali, *“Wawancara selaku muzaki yang berprofesi sebagai wiraswata”*, Bandar Lampung; 28 November 2018
- M. Iqbal Hasan, *“Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya”*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996
- Mardalis, *“Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal”*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Marliyati, *“Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung”*, Vol. 2 No. 2, Bandung; 2015
- Moh. Papundu Tika, *“Metode Riset Bisnis”*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, Cet-1
- Muhammad Yusuf, *“Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan High Profil Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2005-2007”*, Vol. 4 No. 3, 1 Mei 2011

- Nur Hisamuddin-Iva Hardianti Sholikha, *“Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang”*, Vol.1 No. 1, Lumajang, 2012
- Rika, Dkk, *“Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Terhadap Lembaga Amil Zakat Kota Bandung”*, Vol. 1 No. 1, Bandung; 2014
- Rizki Fitriansyah, *“Wawancara dengan Distributor dan Pendayaguna Zakat Baznas kota Bandar Lampung”*, (Bandar Lampung; 26 November 2018)
- Sabrina Shahnas, *“Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara”*, Vol. 3 No. 4 SULUT; 2014
- Siska Riani, *“Wawancara Selaku Muzaki Baznas Kota Bnadar Lampung”*, Bandar Lampung; 6 Mei 2019
- Siti Wasila, *“Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al – Falah Surabaya”*, Vol. 3 No. 3, Surabaya; 2010
- Sri Sukei Adi Wimarta, Adi Sunaryo, Dkk, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga”*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, Bandung: Alfabeta, Cet ke-4, 2008
- Suhada Hidayat, *“Wawancara selaku muzaki yang berprofesi sebagai karyawan swasta”*, Bandar Lampung; 29 November 2018
- Sutrisno Hadi, *“Metode Research Jilid 1”*, Yogyakarta: Andi, 2002
- Suwardjono, *“Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan”*, Yogyakarta; 2008
- Yuniarto, *“Wawancara Selaku Muzaki Baznas Kota Bandar Lampung”*, Bandar Lampung; 6 Mei 2019